



BAB III METODE

PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian atau Gambaran

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratarna Genteng Surabaya. KPP Pratarna terletak di Jl. Kayoon No. 28 Surabaya. Yang menjadi objek penelitian bagi peneliti adalah mengenai jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang telah mengajukan PMK No. 91 tahun 2015 terhadap Total Wajib Pajak yang telah terdaftar di KPP tersebut.

3.2 Pendekatan Penelitian dan Sumber Data

3.2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada. Setelah mengumpulkan semua data yang diperlukan kemudian menarik sebuah kesimpulan berdasarkan analisa yang akan dilakukan dalam penelitian ini, khususnya pada respon dari Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan terhadap **PMK** No. 91 tahun 2015.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan perasaan dan perilaku individu ataupun sekelompok orang. Menurut Sugiyono (2011:13), penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah, bersifat deskriptif, menekankan pada proses, analisis data secara induktif, serta lebih menekankan makna. Penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu

suatu penelitian yang menilai dan mengungkapkan permasalahan mengenai apa adanya (*das sein*) sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. (Fuad dan Nugroho, 2014:54).

3.2.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Genteng melalui wawancara dengan fiskus yang bekerja di kantor tersebut.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk hasil olahan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Genteng. Data tersebut akan diberikan melalui persetujuan dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak yang berada di Jl. Jagir Wonorkomo No. 100-104 Lt. VI dan VIII Surabaya.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel (Informan)

Informan disini dimaksudkan dengan orang yang dinilai mengetahui, dan memahami segala hal apapun yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah salah satu petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Genteng Surabaya dari seksi Waskon (Pengawasan dan Konsultasi) dan karyawan yang menangani tentang objek yang akan diteliti.



3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung keobyek penelitian. Adapun teknik yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data, antara lain:
 - a. Wawancara; berupa kegiatan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang.
 - b. Dokumenter; berupa pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara mengutip, mempelajari atau menggunakan catatan-catatan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Genteng Surabaya.

2. Studi Kepustakaan

Berupa kegiatan mendapatkan data-data dan informasi terkait dengan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP tersebut terhadap pengajuan PMK No. 91 tahun 2015. Melalui data-data dan informasi yang telah didapat, setelah itu mempelajari dan mengumpulkan literatur dari buku-buku, internet, jurnal, dan teori-teori atau bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Dan akan digunakan sebagai dasar teoritis dalam pemecahan persoalan yang diteliti, kemudian mendokumentasikan data-data yang sudah diperoleh tersebut.

3.5 Satuan Kajian

Data yang dibutuhkan untuk penelitian sebagai berikut:

- 1) Jumlah Wajib Pajak (WP) yang mengajukan PMK No. 91 tahun 2015 di KPP tersebut.



- 2) Total Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di KPP tersebut.
- 3) Dasar-Dasar PMK No. 91 tahun 2015.
- 4) Filosofi atau sejarah PMK No. 91 tahun 2015.
- 5) Dampak-dampak dari PMK No. 91 tahun 2015.
- 6) Alasan terbentuknya atau kemunculan PMK No. 91 tahun 2015.
- 7) Dampak PMK No. 91 tahun 2015 terhadap penerimaan negara.
- 8) Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan PMK No.91 tahun 2015.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif deskriptif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mengetahui berapa total Wajib Pajak yang terdaftar di KPP tersebut.
- b) Mengetahui berapa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang mengajukan PMK No. 91 tahun 2015.
- c) Jika data dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, serta total dari Wajib Pajak yang terdaftar sebagai pengguna PMK No. 91 tahun 2015 di KPP tersebut telah didapatkan, lalu data yang telah terkumpul tersebut dikelola untuk melihat respon Wajib Pajak terhadap penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomer 91 tahun 2015 tersebut.
- d) Adapula data olahan yang didapat dari KPP Pratama Genteng tersebut, seperti filosofi PMK No. 91, hal-hal yang mendasari PMK No. 91, dampak-dampak dan lain-lain, dapat ditambahkan untuk mengolah penelitian ini sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh penulis.



- e) Lalu, dapat juga rnengurnpulkan literatur dari buku-buku, internet, jurnal, dan teori-teori atau bahan bacaan lainnya yang relevan untuk dapat rnernbantu dalam penelitian ini.
- f) Metode analisis data dari data yang diperoleh kemudian dikaji berdasarkan analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan kuantitatif (jumlah), akan tetapi dalam bentuk pernyataan dan uraian. Lalu, selanjutnya akan disusun secara sistematik dalam tugas akhir.



BABIV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Organisasi atau Perusahaan

Pertama kali Kantor Pajak di Surabaya hanya ada satu yaitu Kantor Inspeksi Keuangan, yang berlokasi di Jalan Indrapura nomor 5, Surabaya. Sesuai dengan SK (Surat Keputusan) Direktorat Jenderal dari Kantor Inspeksi Keuangan ini dirubah namanya menjadi Kantor Inspeksi Pajak (KIP).

Dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik, sehingga berakibat dengan bertambahnya jumlah pengusaha maupun jumlah Wajib Pajak. Maka dari itu, Kantor Inspeksi Pajak dipecah menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. KIP Surabaya Utara
2. KIP Surabaya Selatan
3. KIP Surabaya Timur

Kemudian pada tahun 1988 dipecah lagi menjadi 4 (empat) yaitu:

1. KIP Surabaya Utara
2. KIP Surabaya Selatan
3. KIP Surabaya Timur, dan
4. KIP Surabaya Barat.

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang baru tahun 1983 yang memakai sistem "*Self Assessment*", dimana Wajib Pajak dipercaya oleh pemerintah untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri hutang pajaknya, sehingga dalam hal ini Kantor Pajak berfungsi sebagai Pelayanan.



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk itu KIP (Kantor Inspeksi Pajak) dirubah lagi namanya menjadi KPP atau Kantor Pelayanan Pajak.

Untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan laporan perpajakannya KPP (Kantor Pelayanan Pajak) di Surabaya dirubah namanya berdasarkan wilayah kecamatan yang terbesar pada suatu daerah masing-masing. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) KPP Surabaya Utara berubah menjadi KPP Surabaya Krembangan
- b) KPP Surabaya Selatan berubah menjadi KPP Surabaya Tegalsari
- c) KPP Surabaya Timur berubah menjadi KPP Surabaya Gubeng
- d) KPP Surabaya Barat berubah menjadi KPP Surabaya Sukomanunggal.

Sebagai perluasan dan pengembangan Kantor Pelayanan Pajak Surabaya, maka berdasarkan Kep.Men.No.94/KMK.01/1994 dibentuklah KPP Surabaya Genteng yang berlokasi di Jalan Raya Arjuna nomor 77 Surabaya, dengan membawahi wilayah:

- a. Kecamatan Bubutan
- b. Kecamatan Simokerto
- c. Kecamatan Genteng

Namun pelaksanaan kerja atau penempatan pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Genteng ini baru dimulai pada tanggal 2 Mei 1994. Dimana KPP Surabaya Genteng (Kecamatan Genteng) dan KPP Surabaya Wonocolo (Kecamatan Wonocolo) ini sebelumnya merupakan wilayah kerja KPP Surabaya Selatan. Namun berdasarkan pada Kep.Men.No.94/KMK.01/1994, KPP tersebut (KPP Surabaya Genteng dan KPP Surabaya Wonocolo) telah berdiri sendiri. KPP Surabaya Genteng ini dulunya merupakan pecahan dari:



- a) KPP Surabaya Kerebangan, dengan Kearnatan Bubutan
- b) KPP Surabaya Tegalsari, dengan Kearnatan Genteng, dan
- e) KPP Surabaya Gubeng, dengan Kearnatan Sironkerto.

Dengan berkembangnya jaman serta ekonorni yang sernakin maju, yang juga rnenambah para pengusaha rnaupun wajib pajak. Maka dari itu beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bertambah dan sebagian ada yang berpindah lokasi. Salah satu eontohnya yakni KPP Genteng Surabaya yang sernula di Jalan Raya Arjuna No. 77 Surabaya, sekarang berlokasi di Jalan Kayoon No. 28 Surabaya. Di Kota Madya Surabaya sekarang ini terdapat 13 (tiga belas) Kantor Pelayanan Pajak (Kantor Wilayah, KPP Madya Surabaya dan KPP Pratarna Surabaya), yaitu:

1. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I: Jl. Jagir Wonokrono No.104 Surabaya, (Wilayah Kerja: Kota Surabaya).
2. KPP Madya Surabaya: Jl. Jagir Wonokrono No.104 Surabaya, (Wilayah Kerja: Kota Surabaya (khusus rnelayani Wajib Pajak Besar)).
3. KPP Pratarna Surabaya Rungkut: Jl. Jagir Wonokrono No.104 Surabaya, (Wilayah Kerja: Kee. Rungkut, Tenggilis Mejoyo, Gunung Anyar).
4. KPP Pratarna Surabaya Wonorelo: Jl. Jagir Wonokrono No.104 Surabaya, (Wilayah Kerja: Kee. Wonorelo, Wonokrono, Jarnbangan, Gayungan).
5. KPP Pratarna Surabaya Karangpilang: Jl. Jagir Wonokrono No.100 Surabaya, (Wilayah Kerja: Kee. Wiyung, Karangpilang, Dukuh Pakis).
6. KPP Pratarna Surabaya Mulyorejo: Jl. Jagir Wonokrono No.100 Surabaya, (Wilayah Kerja: Kee. Tarnbaksari, Mulyorejo, Kenjeran, Bulak).
7. KPP Pratarna Surabaya Pabean Cantikan: Gedung GKN I, Jl. Indrapura No.5 Surabaya, (Wilayah Kerja: Kee. Pabean Cantikan).





8. KPP Pratama Surabaya Krembangan: Gedung GKN I, Jl. Indrapura No.5 Surabaya, (Wilayah Kerja: Kee. Krembangan).
9. KPP Pratama Surabaya Sawahan: Gedung GKN II, Jl. Dinoyo No.111 Surabaya, (Wilayah Kerja: Kee. Sawahan, Bubutan, Asemrowo).
10. KPP Pratama Surabaya Tegalsari: Gedung GKN II, Jl. Dinoyo No.111 Surabaya, (Wilayah Kerja: Kee. Tegalsari).
11. KPP Pratama Surabaya Simokerto: Gedung GKN II, Jl. Dinoyo No.111 Surabaya, (Wilayah Kerja: Kee. Simokerto, Semampir).
12. KPP Pratama Surabaya Gubeng: Jl. Sumatera No.22-24 Surabaya, (Wilayah Kerja: Kee. Gubeng, Sukolilo).
13. KPP Pratama Surabaya Genteng: Jl. Kayoon No.28 Surabaya, (Wilayah Kerja: Kee. Genteng).
14. KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal: Jl. Bukit Darmo Golf No.1 Surabaya, (Wilayah Kerja: Kee. Sambikerep, Tandes, Sukomanunggal, Lakarsantri, Benowo, Pakal).

Dengan bertambahnya Kantor Pelayanan Pajak di Surabaya, diharapkan dapat meningkatkan penggalan potensi fiskal, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dan pemerataan pengenaan pajak. Hal ini juga dapat memudahkan Kantor Pelayanann Pajak untuk memonitor setiap perkembangan Wajib Pajak diwilayahnya masing-masing. Berkenaan dengan hal tersebut juga dapat membuat Wajib Pajak yang baru dapat segera diketahui, dan juga sebaliknya Wajib Pajak yang sudah ada lebih dapat ditingkatkan kesadarannya.

4.1.2 Visi dan Misi

Visi: Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

Misi:

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan;

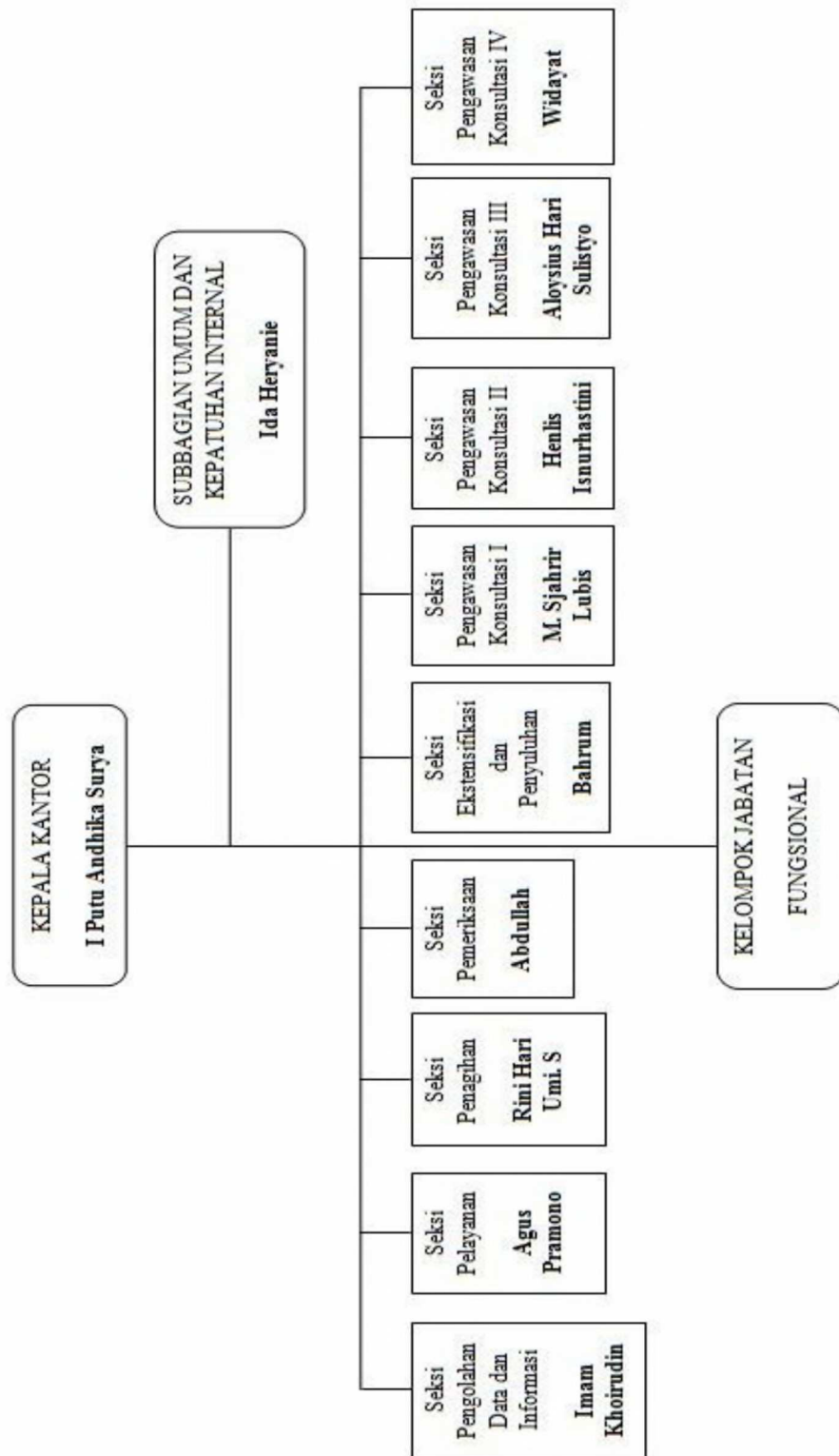
1. Mengumpulkan penenmaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Pelayanan berbasis teknologi modem untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

4.1.3 Struktur Organisasi

Berikut penulis mencantumkan struktur organisasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Genteng, yakni sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Genteng



Sumber : KPP Pratama Surabaya Genteng

4.1.4 *Job Description* (Uraian Pekerjaan) Perusahaan

Berikut deskripsi tugas dari struktur organisasi pada KPP Pratama Surabaya Genteng adalah sebagai berikut:

- 1) Sub bagian Urnurn: memiliki tugas dalam mengatur urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga (persediaan kantor).
- 2) Kepatuhan Internal: mengurus kepatuhan pegawai, lalu mendaftarkan dan melaporkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- 3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi: melakukan pengumpulan atau penberkasan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), pelayanan dukungan teknis komputer, penantauan aplikasi e-SPT maupun e-Filing, pelaksanaan i•SISMIOP (Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak) dan SIG (Sistem Informasi Geografis), serta penyiapan laporan kinerja. Seksi Pengolahan Data disini bertugas untuk mengolah data seperti SPT (Surat Pernberitahuan) yang telah lapor dan masuk di Seksi Pelayanan.
- 4) Seksi Pelayanan: melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pernberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan. Seksi pelayanan disini dibagi menjadi dua, yakni *Front Office* dan *Back Office*. *Front Office* disini memiliki bagian di kantor depan untuk melayani Wajib Pajak seperti registrasi,



sedangkan untuk *Back Office* letaknya dibelakang *Front Office* yang mengurus pengolahan data dan lainnya. Seksi Pelayanan disini menerima WP yang telah masuk dan telah melaporkan SPT, lalu data tersebut dilanjutkan pada Seksi Pengolahan Data.

- 5) Seksi Penagihan: melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- 6) Seksi Pemeriksaan: melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Seksi Pemeriksaan tersebut bisa dibilang sebagai bagian administrasi dari Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan: melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi. Seksi ini memiliki bagian dalam mengatur adanya penyuluhan, atau dengan istilah bagian yang bertanggung jawab dalam penanganan Wajib Pajak Baru dengan melakukan penyuluhan.
- 8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV: masing-masing melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/ himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak





dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I samapai dengan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV memiliki perbedaan, yakni untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi I melayani wajib pajak langsung di TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) atau dengan istilah lain wajib pajak yang memiliki pertanyaan langsung di kantor pelayanan tersebut. Sedangkan untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV memiliki tanggung jawab melayani wajib pajak yang tidak melapor sampai jangka waktu yang panjang (1-2 tahun).

- 9) Kelompok Jabatan Fungsional: melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian ini bisa disebut bagian pemeriksaan dan seksi pemeriksaan sebagai bagian administrasi dari Kelompok Jabatan Fungsional tersebut.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 atau senng disebut dengan PMK No. 91 tahun 2015, yakni tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan tersebut muncul karena adanya pelaksanaan "Tahun Pembinaan Pajak" pada tahun 2015.

Kebijakan tersebut diterapkan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut; (1) Melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak; (2) Mendorong Wajib Pajak melaporkan SPT; (3) Mendorong Wajib Pajak melapor dan menyetor sesuai yang seharusnya; (4) Melakukan pembetulan SPT; (5) Sebagai upaya meningkatkan

penerimaan dan membangun basis data yang kuat. Berbagai respon bermunculan dengan adanya kebijakan tersebut dikeluarkan.

Data yang diperoleh penulis dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surabaya Genteng adalah data total Wajib Pajak yang terdaftar di KPP tersebut, data jumlah Wajib Pajak yang mengajukan PMK Nomor 91 pada tahun 2015, informasi mengenai PMK Nomor 91 tahun 2015, serta hasil wawancara baik dari Wajib Pajak/ Konsultan Pajak maupun dari pihak pegawai pajak (fiskus). Data data tersebut berguna agar dapat menjawab rumusan masalah, serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh penulis. Data total Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Genteng tersebut telah tertulis dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Perkembangan Total Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Genteng

Jenis WP	Th 2013	Th 2014	Th 2015	Th 2016
OP	12.715	13.524	14.274	14.775
Badan	4.670	5.025	5.316	5.467
Jumlah	17.385	18.549	19.590	20.242

Sumber: **KPP** Pratama Surabaya Genteng

Berdasarkan tabel yang tertera diatas, telah diketahui total Wajib Pajak pada tahun 2015 adalah 19.590 orang, yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) sebesar 14.274 orang dan Wajib Pajak Badan sebesar 5.316 orang. Untuk data jumlah Wajib Pajak yang mengajukan PMK No. 91 tahun 2015 telah tertera pada tabel dibawah:



Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak yang mengajukan PMK No. 91 tahun 2015

Bulan	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah Wajib Pajak	29	14	5	14	28	70

Sumber: KPP Pratama Surabaya Genteng

Berdasarkan tabel diatas mengenai jumlah Wajib Pajak yang mengajukan PMK No. 91 tahun 2015 telah diketahui total Wajib Pajak yang mengajukan PMK No. 91 tahun 2015 adalah sebanyak 160 orang, yang terdiri pada bulan Juli sebesar 29 orang, bulan Agustus 14 orang, bulan September 5 orang, bulan Oktober 14 orang, bulan November 28 orang, dan pada bulan Desember 70 orang. Adapun data yang didapat dari KPP Pratama Surabaya Genteng berupa informasi tentang PMK No. 91 tahun 2015.

Dengan adanya tujuan penelitian sebagaimana dimaksud pada bah I, yakni untuk mengetahui respon dari Wajib Pajak terhadap pelaksanaan PMK No. 91 tahun 2015. Maka dari itu, disamping menggunakan total Wajib Pajak yang terdaftar dengan jumlah Wajib Pajak yang mengajukan PMK No. 91 tahun 2015 untuk mengetahui respon Wajib Pajak terhadap kebijakan PMK No. 91 tahun 2015, perlu adanya wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak terkait seeperti Wajib Pajak/ Konsultan Pajak, maupun dari pihak fiskus (petugas pajak). Untuk dapat mengetahui respon Wajib Pajak terhadap PMK No. 91 tahun 2015, telah dilakukan wawancara kepada 3 orang, yang pertama kepada Konsultan Pajak yang sangat setuju dengan adanya kebijakan PMK No. 91 tahun 2015 tersebut. Lalu, untuk berikutnya 2 (dua) orang kepada pihak fiskus (petugas pajak) yang bekerja pada KPP Pratama Surabaya Genteng tersebut. Respon dari kedua pihak

fiskus yakni sangat setuju dengan kebijakan ini, tetapi mereka menjelaskan adanya kelemahan terhadap kebijakan PMK No. 91 tahun 2015 ini.

4.3 Pembahasan dan Analisis Data

4.3.1 Pembahasan mengenai PMK No. 91 tahun 2015

Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2015 adalah "Tahun Pembinaan Wajib Pajak" atau lebih dikenal dengan singkatan TPWP 2015. Berbagai upaya pemerintah telah lakukan untuk meningkatkan penerimaan negara serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya Tahun Pembinaan tersebut, pemerintah ingin membina para Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak supaya dapat lebih menaati serta melaksanakan kewajibannya perpajakannya. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 atau sering disebut dengan PMK No. 91 tahun 2015, yakni tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Perbetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak. Yang menjadi dasar hukum PMK No. 91 tahun 2015 adalah Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi

tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Kebijakan ini tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan *Sunset Policy* jild II, karena kebijakan ini lebih tepatnya adalah pelaksanaan kebijakan tahun pembinaan di tahun 2015. Namun hal itu, dikarenakan adanya hal yang sama dengan ketentuan *Sunset Policy* tahun 2008 kemarin, yaitu tentang penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh dan/ atau melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh. Ada pula perbedaan diantara *Sunset Policy* tahun 2008 dengan kebijakan ini (PMK Nomer 91 tahun 2015), yakni sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perbedaan *Sunset Policy* tahun 2008 dengan PMK No. 91 tahun 2015

Keterangan	Perbedaan	
	<i>Sunset Policy</i> tahun 2008	PMK No. 91/PMK.03/2015
Dasar Hukum	Pasal 37 A UU KUP	Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP
Keluasan Jenis Pajak	Hanya terbatas SPT Tahunan	Untuk SPT Tahunan dan SPT Masa
Tahun Pajak	Tahun pajak 2007 dan sebelumnya	Untuk SPT Tahunan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya (5 tahun ke belakang), dan Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya
Klausul Tertentu	Terdapat klausul yang menyatakan bahwa bagi WP yang dengan sukarela mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan	Tidak ada klausul tidak akan dilakukan pemeriksaan



	melaporkan SPT tahunan untuk tahun-tahun pajak sebelum pada tahun mendapatkan NPWP tidak akan dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan SPT yang disampaikan tidak benar	
Sanksi Adminitrasi	Sanksi dihapuskan secara otomatis (tidak diterbitkan produk hukum (STP))	Sanksi administrasi dihapuskan dengan syarat Wajib Pajak mengajukan permohonan
Surat Pernyataan	Tidak ada syarat dan kewajiban membuat surat pernyataan	Syarat utama permohonan adalah keterlambatan pelaporan, pembetulan, keterlambatan pembayaran dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya dan dinyatakan dengan surat pernyataan

Sumber : KPP Pratama Genteng Surabaya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 berlaku sejak tanggal diundangkan/ ditetapkan. Kebijakan ini ditetapkan 30 April 2015 di Jakarta oleh Bambang P.S.Brodjonegoro, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan diundangkan pada 4 Mei 2015 di Jakarta oleh Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang KUP, dimana ketentuan pelaksanaan untuk

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah Peraturan Menteri Keuangan, maka dari itu kebijakan ini (PMK No. 91 tahun 2015) tidak menggunakan ketentuan yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Berlakunya PMK-91/PMK.03/2015 tersebut, setidaknya untuk SPT 5 (lima) tahun ke belakang yang dihitung sejak Tahun Pajak 2014 (SPT Tahunan PPh) dan/ atau Masa Pajak Desember 2014 (SPT Masa). SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Sedangkan, SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Macam-macam SPT yang menjadi ruang lingkup pengajuan permohonan penghapusan sanksi dalam PMK-91/PMK.03/2015, yaitu SPT Tahunan PPh Badan, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPN bagi penungut PPN.

Hal-hal yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan atau memperoleh fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, yakni Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak, dan permohonan tersebut dapat disampaikan ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dimana Wajib Pajak telah terdaftar. Dengan adanya hal tersebut, dimaksudkan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib administrasi, baik dari sisi Wajib Pajak selaku pemohon maupun Direktur Jenderal Pajak selaku termohon. Bagi Wajib Pajak yang telah melakukan pembetulan SPT atau melaporkan SPT terlambat atau terlambat membayar serta sudah diterbitkannya STP sebelum berlakunya PM - 91/PMK.03/2015, maka WP tersebut dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi meskipun diajukan setelah tahun 2015 dengan syarat sepanjang masa pajak dan tahun pajak memenuhi ketentuan dalam



PMK-91/PMK.03/2015, dan perbetulan, pembayaran, dan/ atau pelaporan yang dilakukan oleh WP di tahun 2015 tersebut.

Berkenaan atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat dapat mengurangi atau menghapuskan Sanksi Administrasi. Dalam hal ini, sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Kekhilafan Wajib Pajak atau bukan kesalahan Wajib Pajak dalam PMK-91/PMK.03/2015 tersebut dibatasi hanya kalau disebabkan adanya:

- a. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/ atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
- b. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
- c. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/ atau
- d. Perbetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauannya sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/ atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang dilakukan pada tahun 2015.

Dalam perihal jangka waktu Wajib Pajak untuk pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi tidak diatur dalam peraturan. Namun, kapan STP dikeluarkan ini yang akan didorong untuk secepatnya dikeluarkan. Juru Sita





hendaknya juga memberitahu WP jika terdapat fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini, jangan sampai pihak fiskuslah yang akan disalahkan karena WP tidak tahu adanya fasilitas ini. Didalam kebijakan PMK-91/PMK.03/2015 tersebut, tetap harus diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), karena sesuai dengan prosedur dalam Undang-Undang KUP, dimana setiap sanksi administrasi yang dikenakan harus diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). STP (Surat Tagihan Pajak) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.

Kebijakan ini memiliki batasan-batasan atas sanksi yang dapat dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, batasan mengenai sanksi administrasi apa saja yang dapat dikurangkan atau dihapuskan dalam PMK-91/PMK.03/2015, serta sanksi administrasi yang termasuk dalam ruang lingkup kebijakan PMK-91/PMK.03/2015 tersebut. Batasan atas sanksi yang dapat dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah sanksi yang timbul akibat pelaporan, pembetulan, pembayaran SPT Tahunan 2014 dan sebelumnya dan/ atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya yang dilakukan di tahun 2015. Batasan-batasan mengenai sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan dalam PMK-91/PMK.03/2015, yakni (1) kebijakannya tersebut hanya *meng-cover* sanksi administrasi yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan *self-assessment system*. Sistem tersebut memberikan hak kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, sehingga apabila dalam pelaksanaannya terdapat konsekuensi adanya pengenaan sanksi administrasi kepada WP, maka terhadapnya diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi



adminitrasi. (2) Jika WP belum pernah membayar pajak yang terutang dan melaporkannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (KPP), maka apabila WP melakukan pembayaran dan melaporkan pajak yang terutang di tahun 2015, sanksi administrasi yang dikenakan kepada WP akan diberikan pengurangan atau penghapusan. (3) Jika WP merasa bahwa pembayaran pajak yang terutang dan pelaporannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (KPP) tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka apabila WP melakukan pembetulan atas SPT-nya dan pembayaran atas kekurangan pembayaran pajaknya di tahun 2015, maka sanksi administrasi yang dikenakan kepada WP akan diberikan pengurangan atau penghapusan. (4) Jika ada orang pribadi/ badan yang seharusnya sudah terdaftar sebagai WP akan tetapi belum mendaftarkan diri, maka apabila orang pribadi/ badan tersebut mendaftarkan dirinya, dan kemudian melakukan pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang di tahun 2015, maka sanksi administrasi yang dikenakan kepada WP akan diberikan pengurangan atau penghapusan. Lalu, untuk sanksi administrasi yang termasuk dalam ruang lingkup kebijakan di PMK-91/PMK.03/2015, yaitu:

- a. Denda karena keterlambatan penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang KUP;
- b. Bunga karena pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang KUP;
- c. Bunga karena pembetulan SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2a) Undang-Undang KUP;

- d. Bunga karena keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dalam SPT Masa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP;
- e. Bunga karena keterlambatan pembayaran atau penyetoran kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2b) Undang-Undang KUP; dan/atau
- f. Denda karena tidak membuat atau terlambat membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.

4.3.2 Pembahasan mengenai langkah-langkah mengajukan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi

Kebijakan PMK-91/PMK.03/2015 tersebut, tidak terlepas dari syarat-syarat maupun ketentuan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi tersebut. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, adalah :

- a. Satu (1) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
- b. Secara tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia;
- c. Ditandatangani oleh Wajib Pajak (untuk WP OP), wakil Wajib Pajak (untuk WP Badan) dan tidak dapat dikuasakan. Untuk wakil WP lihat pasal 32 ayat (1) Undang-Undang KUP;
- d. Disampaikan ke KPP dimana WP terdaftar.

Secara khusus dalam PMK-91/PMK.03/2015, permohonan dapat diterima oleh KPP apabila permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi disampaikan oleh bukan Wajib Pajak (WP), meskipun permohonan tersebut





ditandatangani oleh WP, pernyataan tersebut tidak diatur secara khusus dalam PMK-91/PMK.03/2015. Namun pada prinsipnya, sepanjang ditandatangani oleh Wajib Pajak (untuk WP OP) dan wakil Wajib Pajak (untuk WP Badan) permohonan dapat diterima. Adapun dokumen-dokumen yang harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi, yakni sebagai berikut:

- a. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak, dan/atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan ditandatangani di atas materai oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak Badan;
- b. Fotokopi SPT atau SPT pembetulan atau *printout-nya* bila berbentuk dokumen elektronik;
- c. Fotokopi bukti tanda terima atau tanda pengiriman SPT sebagai bukti penyampaian SPT;
- d. Fotokopi SSP atau sarana lain sebagai bukti pelunasan; dan
- e. Fotokopi STP.

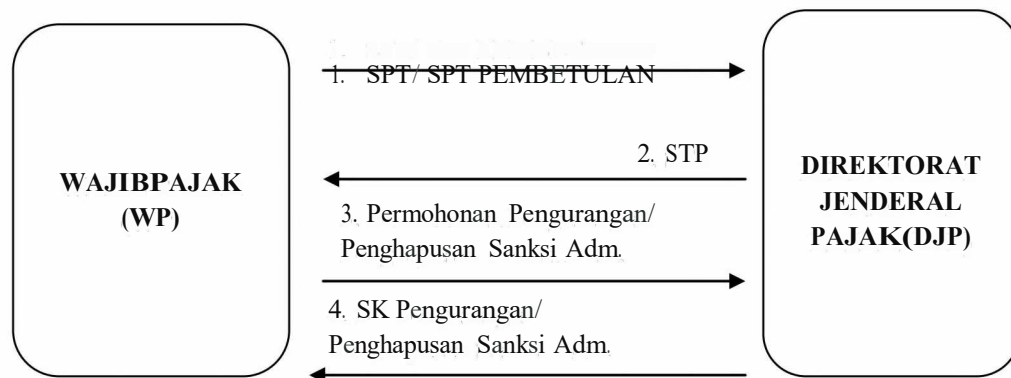
Selain syarat dan dokumen yang telah dilampirkan, ada ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi tersebut, yakni sebagai berikut:

- a. Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak belum dibayar oleh Wajib Pajak; atau
- b. Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak sudah dibayar sebagian oleh Wajib Pajak.

Dalam hal ini sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak telah diperhitungkan dengan kelebihan pembayaran pajak, yang dilakukan melalui potongan SPM (Surat Perintah Membayar), dan/atau transfer pembayaran, sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak dianggap belum dibayar oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi paling banyak 2 (dua) kali. Dan permohonan kedua tersebut dapat diajukan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi setelah surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim. Berikut proses pengajuan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi:

Gambar 4.2 Proses pengajuan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi



Sumber: KPP Pratama Surabaya Genteng

4.3.3 Analisa respon Wajib Pajak dilihat dari Total WP yang terdaftar dengan Jumlah WP yang mengajukan PMK No. 91 tahun 2015

Kebijakan pajak yang ada di Indonesia seringkali mendapat banyak respon positif maupun negatif. Kali ini penulis ingin mengetahui respon Wajib Pajak dan menganalisa melalui data yang dilihat dari Total Wajib Pajak (WP) yang terdaftar

dengan Jumlah Wajib Pajak (WP) yang mengajukan PMK No. 91 tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Genteng tersebut, dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 4.4 Perkembangan Total Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Genteng

Jenis WP	Th 2013	Th 2014	Th 2015	Th 2016
OP	12.715	13.524	14.274	14.775
Badan	4.670	5.025	5.316	5.467
Jumlah	17.385	18.549	19.590	20.242

Sumber: KPP Pratama Surabaya Genteng

Gambar 4.3 Jumlah Wajib Pajak yang mengajukan PMK No. 91 tahun 2015



Sumber: KPP Pratama Surabaya Genteng (*data diolah*)

Dilihat dari tabel 4.4 Perkembangan Total Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Genteng di atas pada tahun 2015 menunjukkan total untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 14.274 orang, untuk Wajib Pajak Badan sebesar 5.316 orang, jadi untuk total Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Genteng tersebut adalah 19.590 orang. Lalu berlanjut pada gambar 4.3 Jumlah Wajib Pajak yang mengajukan PMK No. 91 tahun 2015 menunjukkan bahwa pada





bulan Juli awal Wajib Pajak mengajukan PMK No. 91 tahun 2015 sebesar 29 orang, bulan Agustus mengalami penurunan sebesar 14 orang, sedangkan pada saat bulan September sangat mengalami penurunan drastis WP yang mengajukan PMK No. 91 tersebut sebesar 5 orang, lalu pada bulan Oktober mulai mengalami kenaikan WP yang mengajukan kebijakan tersebut sebesar 14 orang, bulan November sebesar 28 orang, lalu berakhir pada akhir tahun sebesar 70 orang.

Jika dilihat dari keterangan pada tabel 4.4 Perkembangan Total Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Genteng dan gambar 4.3 Jumlah Wajib Pajak yang mengajukan PMK No. 91 tahun 2015, menunjukkan bahwa tidak ada setengah dari total WP yang terdaftar terhadap WP yang mengajukan PMK No.91 tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang mendasari kurangnya respon Wajib Pajak terhadap kebijakan PMK No. 91 tahun 2015 tersebut. Beberapa faktor yang dimaksud salah satunya dikarenakan kurang kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajibannya untuk melaporkan SPT mereka, disisi lain dikarenakan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap kebijakan yang baru keluar, maka dari itu jumlah Wajib Pajak yang mengajukan sangatlah sedikit dibanding dengan total Wajib Pajak yang terdaftar.

Berdasarkan gambar 4.3 Jumlah Wajib Pajak yang mengajukan PMK No. 91 tahun 2015, menunjukkan adanya penurunan yang drastis pada bulan Oktober dan mengalami kenaikan pada bulan selanjutnya dan berakhir pada bulan Desember sebesar 70 orang yang mengajukan PMK No. 91 tahun 2015. Salah satu fiskus di KPP Pratama Surabaya Genteng menjelaskan bahwa, di bulan November-Desember para pengusaha khusus nya Wajib Pajak menggunakan prinsip "*wait and see.*" Hal itu dikarenakan kemungkinan adanya isu *Tax Amnesty* yang sudah

dikeluarkan pada bulan Desember, sehingga mengakibatkan para pengusaha khususnya Wajib Pajak menarik lagi keinginannya untuk tidak mengajukan PMK No. 91 tahun 2015. Jika tidak adanya isu tentang *Tax Amnesty* pada bulan Desember tersebut kemungkinan jumlah pengusaha (Wajib Pajak) yang mengajukan PMK No. 91 tahun 2015 bisa lebih dari jumlah yang tertera dalam gambar tersebut.

4.3.4 Analisa respon Wajib Pajak dilihat dari hasil wawancara terhadap Wajib Pajak/ Konsultan Pajak

Respon Wajib Pajak terhadap kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 tahun 2015 ini sangatlah berbeda-beda. Wajib Pajak yang mengajukan PMK No. 91 tahun 2015 kebanyakan tidak hadir dalam pembayaran langsung di KPP (Kantor Pelayanan Pajak), tetapi mereka menyuruh orang kepercayaan (orang suruhan) maupun menyewa jasa konsultan pajak. Konsultan Pajak disini dimaksud dengan orang/ pihak perantara sebagai pengganti Wajib Pajak.

Salah satu respon Wajib Pajak terhadap PMK No. 91 tahun 2015 telah didapat penulis dari salah satu konsultan pajak yang menangani Wajib Pajaknya yang terkena dan mengajukan PMK No. 91 tahun 2015. Beliau adalah salah satu Wajib Pajak juga tetapi diluar KPP Pratama Surabaya Genteng. Tanggapan beliau tentang adanya kebijakan PMK No. 91 tahun 2015 tersebut sangatlah setuju, dikarenakan adanya fasilitas pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi tersebut yang membuat Wajib Pajak menjadi setuju. Keuntungan yang didapat saat mengajukan kebijakan tersebut tak lain karena, jika permohonan atas pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi tersebut dikabulkan oleh





Direktorat Jenderal Pajak maka keuntungan yang didapat yakni dapat berkurangnya denda maupun bunga yang ditanggung oleh Wajib Pajak. Respon positif pun datang dikarenakan dengan kesetujuan beliau terhadap kebijakan PMK No. 91 tahun 2015 tersebut, membuat beliau ingin kebijakan tersebut tetap ada untuk dilanjut kedepannya.

4.3.5 Analisa respon Wajib Pajak dilihat dari hasil wawancara terhadap fiskus (petugas pajak)

Berbagai respon terhadap PMK No. 91 tahun 2015 sangat berbeda-beda dari segi Wajib Pajak/ Konsultan Pajak, hingga dilihat dari data KPP terhadap jumlah Wajib Pajak yang mengajukan PMK No. 91 tahun 2015. Kali ini respon didapat dari fiskus (petugas pajak) mengenai kebijakan PMK No. 91 tahun 2015 tersebut. Bagi pihak fiskus, kebijakan ini sangatlah menguntungkan dikarenakan PMK No. 91 tahun 2015 ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara dan kebijakan tersebut membuat kenaikan penerimaan negara. Kebijakan ini juga sangatlah menguntungkan baik bagi pihak WP maupun pihak petugas pajak (fiskus). Jika dari Wajib Pajak menguntungkan karena adanya pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi baik berupa denda maupun bunga, sedangkan dari pihak fiskus sangat menguntungkan dari sisi penerimaan negara dapat meningkat.

Respon yang diberikan pihak fiskus terhadap PMK No. 91 tahun 2015 tersebut sama halnya dengan respon yang diberikan oleh salah satu konsultan pajak, yakni sama-sama ingin kebijakan ini tetap ada untuk kedepannya. Tetapi, bagi pihak fiskus kebijakan ini diteruskan untuk kedepannya dengan catatan memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam kebijakan ini. Kelemahan yang

dimaksud disini adalah kurang bayar yang diterima oleh Wajib Pajak (WP) tidak sebanding dengan harta yang ditambahkan oleh Wajib Pajak, dan itu semua tidak ada di dalam peraturan kebijakan tersebut (PMK No. 91 tahun 2015). Semisal, Wajib Pajak (WP) memasukkan harta IOM (sepuluh miliar), tetapi kurang bayar yang Ia terima hanya 500.000 (lima ratus ribu rupiah), itu juga bisa terjadi. Jadi WP (Wajib Pajak) bebas memasukkan berapapun penghasilannya/ hartanya, tetapi tidak diatur dalam hal kurang bayarnya harus berapa atau tidak adanya tarif yang pasti ditentukan. Hal itu juga, tidak sebanding jika dihitung tarif secara manual (kurang bayar), terutama pada hartanya.



